

RINGKASAN

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penambang Pasir di Sungai Brantas mengamanatkan bahwa penambangan pasir secara mekanik di Sungai Brantas tidak diperbolehkan. Selama ini sosialisasi dalam rangka implementasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C sangat kurang, bahkan aparat pengakan peraturan tersebut lebih mengedepankan pendekatan kekuasaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan represif (operasi penertiban penambangan pasir Sungai Brantas) daripada pendekatan – pendekatan kemanusiaan dengan melakukan kegiatan-kegiatan persuasif dalam rangkaian human relation.

Penelitian ini berusaha untuk mendiskripsikan bagaimana Pemerintah kecamatan Plosos berhasil mengimplementasikan Perda No 1 Tahun 2005, padahal kecamatan lain di wilayah Kabupaten Jombang tidak berhasil melakukan hal itu.

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini mewawancara tokoh-tokoh kunci yang berkontribusi dalam implementasi perda tersebut. Sedangkan untuk memperkuat wawancara mendalam, obeservasi secara seksama juga dilakukan khususnya terhadap aktivitas penambangan pasir di wilayah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mensukseskan kegiatan implemetasi Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C, Pemerintah Kecamatan Plosos telah melakukana sosialisasi kebijakan tersebut secara intens, utamanya kepada masyarakat yang bersentuhan langsung dengan kebijakan tersebut dan secara umum kepada masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan partisipasi. Selain itu, semangat dan kemauan aparatur penegakan Peraturan daerah untuk melakukan kegiatan yang mengedepankan pendekatan-pendekatan kemanusiaan (persuasif) dengan human relation secara intens, efektif dan sebaliknya memperkecil intensitas kegiatan yang menggunakan pendekatan-pendekatan kekuasaan (represif) karena sejatinya masyarakat obyek penegakan Peraturan daerah bukanlah lawan tapi mereka adalah warga masyarakat kita yang seharusnya kita lindungi, kita amankan dan kita selamatkan.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2005 di Kecamatan Plosos telah berjalan efektif. Karena penambang pasir menjadi tahu dampak dari penambangan pasir secara mekanik dan jumlah penambang di wilayah Kecamatan Plosos juga mengalami penurunan. Sedangkan untuk saran dan rekomendasi, peneliti menyarankan agar implementasi sebuah kebijakan juga harus disertai dengan sosialisasi yang intensif disesuaikan dengan urgensinya. Kalau penambang pasir di minta untuk menghentikan aktivitasnya, maka perlu ada alternative pekerjaan untuk mereka sehingga tidak menanggur.

ABSTRACT

Sand is the part of important commodity on the building construction. The problem is mining activity on the river. Without control from the government, the miner was destruct of the river ecology. The victim potential like flood and rock of dam, can be happen every time. The government of East Java Province was regulate to manage the sand mining on Region Constitution Number 1 on 2005. This regulation just give an opportunity for the traditional miner.

This research was held in Plosok District on Jombang East Java. The most interesting from principle of Plosok District is their method to reduce miner quantity until more than 40 percent in two years. When many district was failed to reduce sand miner on their location.

The researcher use descriptive qualitative method to describe policy implementation of the research object. This research was collect the information with indeep interview, observation and literacy.

The researcher find that Plosok District was successfully to reduce minning quantity with human relation method. They do the persuasive approach to make a social awarness of miner community. The miner community can be understanding the risk of their activity. The other way to implemented this regulation, Plosok District successfully to make a network with many stakeholder like muspika, elite local, The miner community and still many element that support this regulation. Now, Plosok district was be the sample for other district for their approach to policy implementation.

Keyword : Policy Implementation, human relations, mining, social awarness